

EDISI 12 | DESEMBER 2024

PARLEMEN

Majalah Bulanan DPRD Sumenep



KALEI DOSKOP 2024



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMENEP
MENGUCAPKAN SELAMAT

SELAMAT *Natal*

dan Tahun Baru



Dari Redaksi

Pembaca yang budiman...
Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui :

Email:
redaksi.majalahparlemen@gmail.com
Website:
www.dprd-sumenepkab.go.id
SMS center:
085942803888

Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi



M A J A L A H PARLEMEN

Penerbit:
Sekretariat DPRD Sumenep

Pelindung:
Ketua DPRD Sumenep

Pembina:
Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si
(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:
Hasan Bashri, SH
(Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)

Dewan Redaksi:
Herman, S.Sos, M.Si
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

Siti Hairunnisyak, SE
(Penasihat Legislatif Ahli Muda)

Yuni Kurniawati, SH
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)

Staf Redaksi:
Desy Warsiyanti, SE
Airur Rofiq, SH
Mohammad Yahya N., S.Ap

Reporter:
Salamei
Andreas Nugroho, A.Md.Kom

Fotografer:
Ibnu Fajar

Lay out & Grafis:
AD Anugerah

Alamat Redaksi & Sirkulasi:
Bagian Persidangan
dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Sumenep
Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

DAFTAR ISI

04

Kaleidoskop

Maksimalkan Pendapatan Melalui Perda Pajak dan Retribusi

10

Kaleidoskop

Bahas APBD, Hasil Reses Diprioritaskan!

16

Kaleidoskop

Evaluasi Kegiatan Melalui LKPJ

22

Kaleidoskop

Kecewa Serapan APBD Rendah

28

Kaleidoskop

Berjibaku Tuntaskan RPJMD

34

Kaleidoskop

Dorong Pembangunan Pro Rakyat

40

Opini

Kaleidoskop 2024

SAPA REDAKSI



HASAN BASHRI, SH
Pemimpin Redaksi

Tak terasa, sudah 11 bulan berlalu, dan saat ini sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2024. Dengan begitu, majalah parlemen sudah setahun menyapa para pembaca budiman, dengan menghadirkan informasi berbagai kegiatan, ide dan gagasan para anggota DPRD Sumenep. Sehingga, kerja-kerja karakyatan yang dilakukan bisa sampai kepada publik. Sebab, keberadaan majalah ini bisa dijadikan media komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat umum.

Sebenarnya, masih banyak kegiatan para legislator yang belum tersampaikan lewat majalah ini, lantaran keterbatasan rubrik dan halaman yang tersedia. Sehingga, kegiatan, ide dan gagasan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bisa tersampaikan. Yang jelas, anggota dewan sudah bekerja maksimal unntuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sebab, mereka sadar bahwa apa yang dilakukan di

gedung dewan bagian dari memperjuangkan hak-hak rakyat.

Yang pasti, para wakil rakyat memiliki komitmen untuk mendorong suksesnya pembangunan daerah menuju yang lebih baik dengan melakukan sinergi dengan eksekutif. Dan, pasti selalu mendukung segala kebijakan pemerintah yang bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, pengawasan terhadap kegiatan pro rakyat menjadi hal utama bagi para aspirator itu.

Terlepas dari semua itu, pada terbitan terakhir majalah Parlemen di tahun 2024 ini, kami, tim redaksi meminta maaf atas segala kekurangan, karena itulah kemampun dari kami. Dan, disampaikan terima kasih atas konsistensi pembaca untuk menemukan informasi tentang anggota dewan melalui majalah ini. Semoga di tahun depan akan lebih baik. Sampai ketemu kembali di tahun 2025. •

MAKSIMALKAN PENDAPATAN MELALUI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI

Perjuangan anggota DPRD Sumenep dalam menutaskan rancangan peraturan daeran (Raperda) Pajak dan Restribusi patut diapresiasi.

Pasalnya, mereka berhasil menyelesaikan pembahasan pada tahun yang sama, di 2023 lalu. Sebab, keberadaan rancangan regulasi tersebut dianggap sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten ujung timur Pulau Madura.

Tuntasnya pembahasan tersebut setidaknya bisa berjalan kelindan dengan alai yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab). Seharusnya, penun-tasan raperda dan menjadikan perda langsung dilanjutkan dengan eksekusi. Sehingga, peraturan itu tidak hanya sekadar tulisan di atas kertas saja, melainkan harus dilak-sanakan. Sementara untuk pelaksananya tentu saja adalah eksekutif, bupati dan jajarannya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Otomatis, keberadaan raperda tersebut bukan lagi berda di tangan legislatif, melainkan sudah berada di esekutif untuk dijalankan. Jadi, saat ini tinggal menunggu political will dari pemerintah untuk menjalankannya. Idealnya, setelah tuntas dibahas maka langsung dieksekusi apalagi berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak dan retribusi. Tentu itu sangat baik untuk daerah.

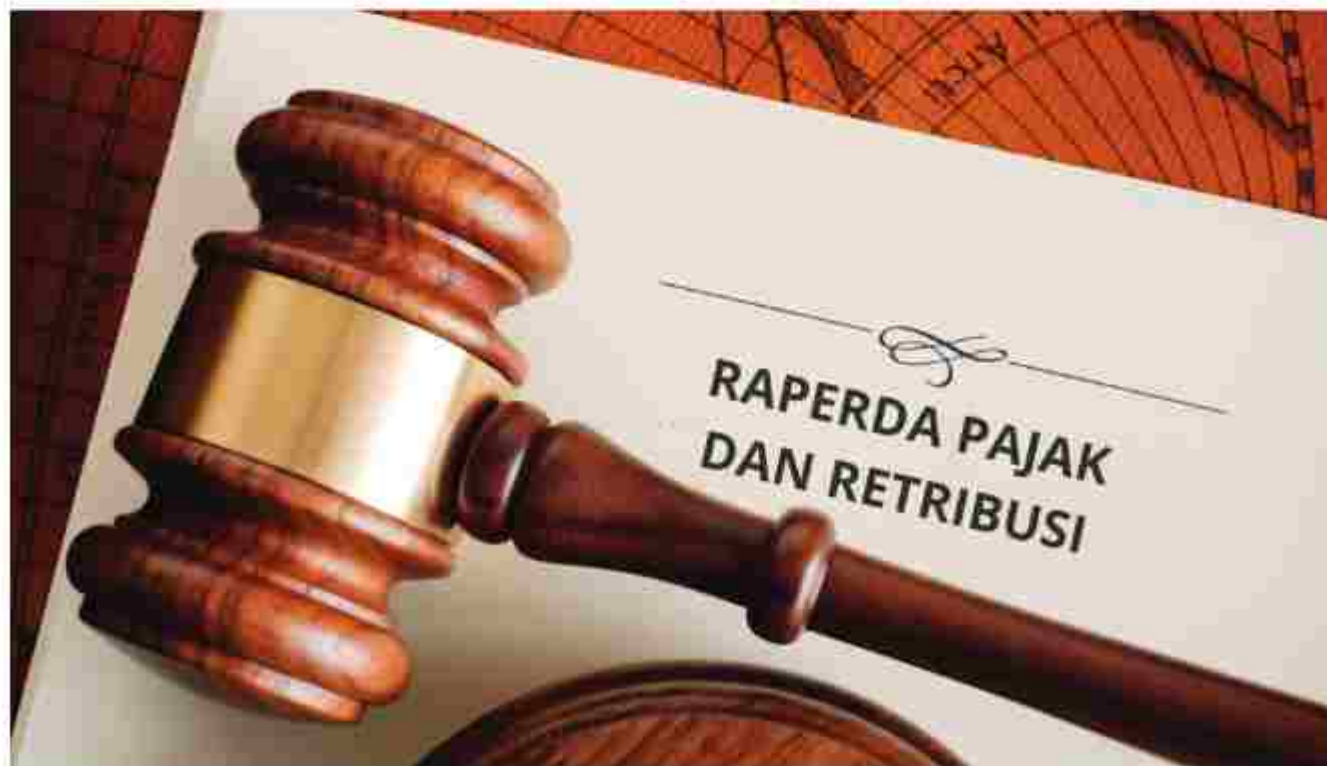
Seyogyanya, setelah tuntas dilakukan pembahasan dan sudah dilakukan evaluasi oleh

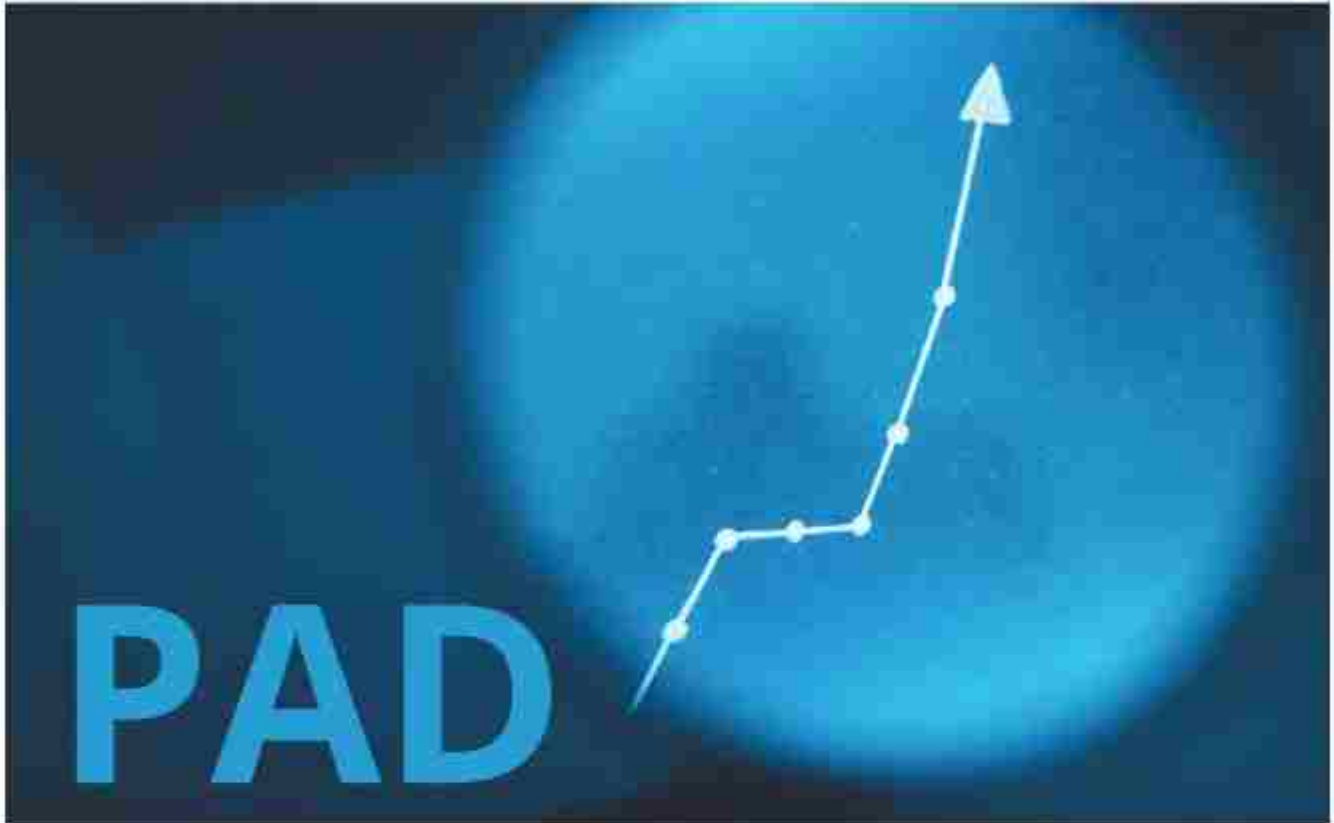
RAPERDA

Gubernur Jatim, maka hendaknya ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penerbitan peraturan bupati (perbup). Perbup itu dibutuhkan sebagai aturan pelaksanaan dari regulasi dimaksud. Jadi, hendaknya tidak menunggu lama dalam pelaksanaan ini menyangkut peningkatan pendapatan yang berimpak pada makin besarnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Perbup itu adalah pedoman teknis. Dan, apabila tidak ada peraturan teknis yang mengatur, bisa jadi perda tersebut hanya tuntas dibahas namun tidak dijalankan oleh pemerintah daerah. Sehingga, keberadaan sebuah peraturan hanya menjadi mubazir. Dengan kata lain, kerja keras para legislatif harus dihargai oleh pemerintah, salah satunya menjalankan hasil pembahasan tersebut yang dianggap sangat mendesak dan dikejar penuntasannya.

Raperda itu dinilai mendesak lantaran pajak dan retribusi memegang perananan penting sebagai salah satu sumber pendapatan. Hal itu dilakukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sehingga, keberadaannya menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang digali sesuai dengan





kondisi dan potensi yang ada di daerahnya. Sehingga, pemerintah daerah tentu harus beribaku dalam meningkatkan pendapatan tersebut.

Diakui, ketika pendapatan pajak maupun retribusi mengalami peningkatan maka sudah dipastikan PAD juga akan mengalami peningkatan yang sama. Dan, jika perolehan maksimal, pembangunan juga akan lebih banyak lagi. Meski pajak dan retribusi bukanlah satu-satunya pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), namun setidaknya mampu menopang pembangunan kota Sumekar.

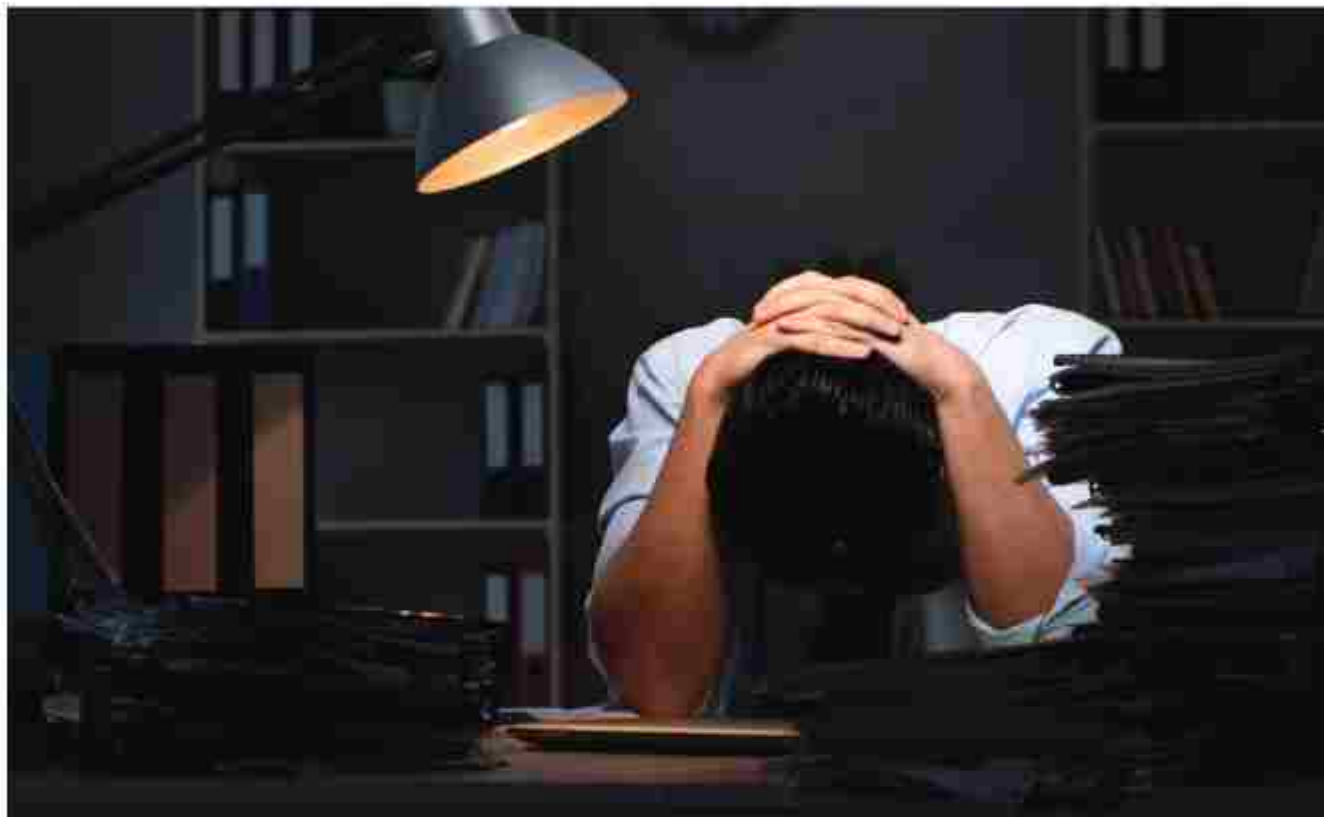
Dengan demikian, keberadaannya dipastikan mampu meningkatkan pendapatan guna menopang pembangunan daerah, maka raperda pajak retribusi menjadi payung atau dasar dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Sehingga, para pemangku kebijakan tidak lagi canggung dalam memungut pajak dan retribusi kepada masyarakat.

Apalagi, soal pajak dan retribusi tersebut merupa-

kan salah satu sektor penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan Jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Di mana peraturan itu mengisyaratkan pentingnya perda pajak dan retribusi.

Dinamika Pembahasan

Pembahasan raperda tersebut tentu tidak mudah, namun membutuhkan perjuangan yang cukup panjang, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Para anggota dewan bersungguh-sungguh melakukan pembahasan menelaah draf akademik yang sudah dipegang. Secara terperinci melakukan kajian bersama dengan anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) yang diben-



tuk oleh DPRD. Para wakil rakyat itu langsung berjabaku menuntaskan pembahasan.

Menjadi wajar, ketika pembahasan tidak bisa dituntaskan dengan sebegitu cepat. Sebab, dinamika pembahasan itu selalu terjadi, bahkan perdebatan sesama anggota pansus juga tidak bisa dielakkan. Berjam-jam dan berhari-hari tidak bisa dituntaskan karena perbedaan persepsi. Maka, menjadi mafhum ketika para anggota dewan harus melakukan kordinasi dan konsultasi dengan pemerintah yang di atasnya. Misalnya, ke Pemrov Jatim hingga ke pusat, termasuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Itu semua dilakukan bukan hanya sekadar untuk memperpanjang waktu pembahasan, melainkan ingin melahirkan perda yang berkualitas. Sehingga, hasilnya pun objektif dan memang mengakomodir permasalahan pajak dan retribusi yang ada di Kota Sumekar. Otomatis, masyarakat akan menjadi nyaman menjalankannya, dan pemerintah juga tidak terlalu berat menjalankan peraturan tersebut karena penerimaan masyarakat juga tinggi.

Sebenarnya, pembahasan raperda itu sem-

pat tersendat. Di mana rancangan peraturan itu cukup lama ngendap di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur.

Itu karena harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil cukup lama. Sebab, sebelum dilakukan pembahasan harus tuntas harmonisasi dulu, dan ternyata cukup lama waktu yang dibutuhkan. Sehingga, pansus sempat terhenti sejenak untuk melakukan pembahasan. Padahal, seandainya dilanjutkan di awal 2023 itu sudah tuntas dilakukan.

Sebab, sesuai dengan aturan terbaru, setiap raperda yang akan dibahas oleh anggota dewan harus tuntas dilakukan harmonisasi. Setelah dilakukan harmonisasi maka sudah bisa dilakukan pembahasan oleh anggota dewan. Ternyata harmonisasi yang dilakukan ternyata cukup lama, sehingga menghambat pembahasan, yang gilirannya penuntasannya pun menjadi malor dan harus dijadwal kembali oleh Bamus.

Anggota pansus raperda Pajak dan Retribusi H. Sami'oeddin mengaku lega karena pembahasan

KALEIDOSKOP

raperda itu sudah tuntas. Dan, penyelesaian tersebut sesuai dengan janji yang disampaikan untuk diselesaikan tahun ini. "Alhamdulillah, sudah tuntas dan setelah mendapatkan register maka dipastikan nantinya bisa dieksekusi untuk dijalankan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak," katanya.

Dia menjelaskan, pembahasan itu memang sempat tersendat lantaran harmonisasi tidak kunjung tuntas. Jadi, lebih dari satu bulan pembahasan itu ditunda atau mengendap karena tidak bisa dilakukan pembahasan. "Memang, prosesnya begitu, mau apa lagi. Tapi, dengan ikhtiar semua anggota pansus raperda tersebut berhasil dituntaskan dengan paripurna. Jadi, kami tidak memiliki tunggakan pekerjaan," tuturnya.

Hanya saja, pihaknya mendesak untuk segera dieksekusi dengan perbup agar segera dijalankan. Sehingga, keberadaan raperda itu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan kabupaten Sumenep. "Silahkan jangan menunggu lama untuk dieksekusi lewat perbup tersebut. Supaya bisa cepat jalan, dan dampaknya bisa dirasakan utamanya dalam pengumpulan pajak dan retribusi untuk peningkatan PAD," tukasnya. *



H. SAMI'OEDDIN

ANGGOTA PANSUS RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI



BAHAS APBD, HASIL RESES DIPRIORITASKAN!



Sejumlah anggota dewan mengaku masih kecewa dengan pemerintah daerah. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum mampu mengakomodir lebih banyak hasil serap aspirasi atau yang biasa dikenal dengan reses para wakil rakyat. Di mana hasil reses itu banyak yang tidak masuk dalam program pemerintah. Sehingga, banyak kegiatan yang diusulkan para legislatif menjadi "tercecer", dan tidak masuk dalam kegiatan pemerintah di tahun berjalan.



Sejak awal para legislator sudah mewanti-wanti kepada eksekutif untuk selalu memerhatikan hasil reses dalam sebuah program pemerintah. Sebab, hasil reses memiliki konsekuensi pertanggungjawaban kepada konstituen yang didatangi saat melakukan serap aspirasi. Biasanya, para konstituen selalu mewanti-wanti agar usulannya menjadi program sesuai dengan harapannya, utamanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti infrastruktur, kesehatan dan lainnya.

Sebab, apabila tidak diakomodir dalam bentuk kegiatan sesuai usulan, biasanya kembali ditanyakan oleh konstituen. Sehingga, itulah yang menjadi beban moral anggota dewan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kegiatan yang dianggap mendesak tentu saja akan diambilkan dari pokok (pokok-pokok pikiran), di mana melekat dengan para anggota dewan. Kendati demikian, anggarannya pun terbatas otomatis tidak akan mampu mengakomodir seluruh usulan dari anggota dewan.

Sebenarnya, para legislator sudah berjuang untuk bisa memasukkan segala bentuk usulan dari hasil reses tersebut. Namun, untuk memasukkannya secara keseluruhan tidak bisa dipaksakan. Alasannya, anggaran yang tersedia dinilai tidak mencukupi untuk mengakomodir aspirasi tersebut. Hanya saja, de-

wan menginginkan ada pembagian proporsional antara hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) dengan hasil reses. Sebab, semua aspirasi tersebut berasal dari masyarakat.

Maka, para wakil rakyat terus akan mengawal hasil reses yang digelar di masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk bisa menjadi sebuah kebijakan kegiatan. Sebab, mereka tidak mau hanya dianggap sebagai janji politik semata yang tidak mampu ditepati oleh para anggota dewan. Sehingga, akan menyebabkan apatis untuk menyalurkan aspirasinya kembali kepada wakil mereka. Apalagi, usulan masyarakat sudah terbilang sangat mendesak, tentu beban moral sebagai aspirator akan semakin tinggi.

"Sejak awal kami sudah memperingatkan pemkab Sumenep dalam membuat kebijakan program APBD. Di mana dalam membuat kegiatan itu tidak hanya sekadar mengacu kepada hasil musrembang semata, melainkan harus mengacu kepada hasil reses anggota dewan. Sebab, anggota dewan memiliki beban tanggungjawab kepada konstituen yang sudah menyampaikan aspirasinya untuk dijadikan dalam bentuk program atau kegiatan," kata Wakil Ketua DPRD Sumenep M. Syukri.

Dia menuturkan, akurasi usulan hasil reses itu dinilai jauh lebih valid; lantaran para anggota dewan langsung turun ke lapangan, dan melakukan dialog





dengan masyarakat. Sehingga, apa yang diinginkan oleh masyarakat akan lebih mengena dibandingkan hanya melalui jenjang birokrasi. Anggota dewan langsung menggelar pertemuan khusus dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasinya.

"Jadi, aspirasi yang kami terima itu langsung dari masyarakat yang memang membutuhkan kegiatan tersebut. Misalnya, jalan itu biasanya memang di sekitar rumah yang ditempati membutuhkan pembangunan jalan. Intinya, para anggota dewan ini langsung bersua dengan masyarakat dengan aspirasi yang dibawanya. Atau data yang diusulkan para anggota dewan orisinal dan warga sekitar. Maka, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak memasukkan dalam program APBD," tuturnya.

Untuk itu, ke depan APBD Sumenep harus mampu mengakomodir hasil reses lebih banyak lagi. Sebab, hasil reses adalah bagian dari kehendak rakyat. Maka, perlu dikawal secara bersama-sama oleh anggota dewan utamanya yang masuk di badan anggaran (banggar). Sehingga, dipastikan nantinya akan banyak kegiatan yang bisa

dimasukkan dalam APBD. "Kami sangat menginginkan banyak yang diakomodir di APBD. Minimal ada porsi separo-separo dengan hasil reses," tuturnya.

Dalam reses anggota dewan yang digelar beberapa waktu lalu, masalah infrastruktur masih menjadi keluhan paling dominan. Sebab, hal tersebut merupakan kebutuhan dasar. Apalagi, masalah infrastruktur merupakan penentu bergeraknya ekonomi masyarakat.

Dengan infrastruktur yang memadai, maka mobilitas warga akan semakin tinggi. Nah, inilah yang menjadi dasar warga selalu mengeluhkan masalah infrastruktur. Misalnya jalan. Di mana masih ada beberapa wilayah di kota Sumekar yang belum tersentuh aspal, utamanya di Kepulauan.

Ada juga jalan rusak yang belum dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Padahal, keberadaannya sudah lama, namun tetap tidak dilakukan perbaikan. Bahkan, warga juga berkeinginan agar disentuh aspal dingin (coldmix) atau aspal panas (hotmix) di sejumlah jalan PUD yang melintang di desa.



Sebab, dua jenis aspal tersebut dinilai lebih bagus dan bertahan lama. Fakta ini hampir menjadi keluhan warga di setiap anggota dewan menggelar reses. Keberadaan Jembatan, tambat labu, dermaga dan plengsengan serta sejumlah infrastruktur lainnya tidak lepas dari “curhat” yang disampaikan warga kepada wakilnya.

Memang, pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur di Sumenep masih terbilang cukup banyak. Sehingga, tidak mungkin bisa diakomodir semua keluhan masyarakat dalam setahun. Tidak hanya soal jalan, melainkan juga dermaga, jembatan, tambat labu, plengsengan dan sejumlah infrastruktur lainnya. Intinya, infrastruktur masih menjadi keluhan yang paling dominan.

Masalah pendidikan juga tidak lepas dari perhatian masyarakat dalam reses. Utamanya berkaitan mutu pendidikan. Yakni, masyarakat menginginkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep lebih ditingkatkan. Maka, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan mutu tenaga pendidiknya. Pemerintah harus memberikan pelatihan, pembinaan dan pengawasan agar tercipta tenaga pendidik berkualitas yang berdampak bagi generasi muda berkualitas.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga menjadi atensi. Di mana masyarakat menginginkan adanya pelayanan prima baik di Puskesmas, maupun di RSUD dr. Moh. Anwar. Yakni, pelayanan yang baik, ramah dan penuh dengan senyum. Jadi, masyarakat menilai pelayanan kesehatan belum maksimal, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah. Termasuk



KALEIDOSKOP

juga peningkatan sarana dan prasarana yang ada.

Kebutuhan akan alsintan (alat mesin pertanian) juga tidak lepas dari aspirasi yang disampaikan, termasuk kebutuhan lain dalam pertanian. Maklum, di Kota Sumekar ini mayoritas warga adalah petani. Sehingga, kebutuhan akan pertanian mejadi sangat vital. Selain, bantuan hibah dan bansos selalu ditingkatkan, termasuk dilakukan kajian dan evaluasi. Itu agar bantuan tersebut bisa diterima masyarakat secara tepat guna. Sebab, masih warga yang membutuhkan namun tidak mendapatkan bantuan dimaksud. Sehingga, bantuan harus dilakukan secara menyeluruh.

Masalah penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi usulan yang tidak kalah penting disampaikan dalam reses. Sebab, saat ini sudah banyak masyarakat yang mengusulkan untuk direalisasikan penerangan di jalan-jalan hingga pelosok. Hal itu dilakukan agar mobilitas masyarakat di malam hari akan tetap berjalan, dan menghindari kerawanan pencurian. Istilahnya keberadaan PJU ini dianggap sudah mendesak. •



M. SYUKRI

WAKIL KETUA DPRD SUMENEP

“

*Kami sangat
menginginkan banyak
yang diakomodir di APBD.*

*Minimal ada porsi
separo-separo dengan
hasil reses”*

A photograph showing three men in traditional Indonesian attire (batik and peci) participating in a ribbon-cutting ceremony. The man on the left is wearing a brown and black batik and glasses. The man in the middle is wearing a green and white batik. The man on the right is wearing a brown and gold batik. They are all holding a large, ornate golden ribbon. In the background, there is a framed portrait of a man in a military uniform, a television screen, and a flag. The setting appears to be a formal event, possibly in a parliament or government building.

EVALUASI KEGIATAN MELALUI LKPJ



DPRD Sumenep mulai fokus menuntaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati atas pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2023 lalu. Bahkan, rancangan peraturan daerah (raperda) itu menjadi atensi untuk dituntaskan pembahasannya oleh para legislator. Sehingga, para anggota dewan berjibaku melakukan pembahasan secara, serius dan maraton.

Maklum, raperda LKPJ itu tersebut merupakan agenda rutin tahunan, menjadi tugas para wakil rakyat. Bahkan, bisa dibilang menjadi kewajiban yang tidak boleh “diundapkan”, untuk dibahas di tahun yang akan datang. Artinya, pembahasan harus dilakukan dengan cepat sesuai dengan jadwal yang sudah diamanahkan oleh badan musyawarah (bamus). Wajar, pembahasan tersebut menjadi atensi khusus dari anggota dewan untuk bisa diselesaikan.

Urgensi pembahasan wajib dan rutin itu juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di mana dalam Pasal 18 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Aturan itu mengikat untuk seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Sumenep saja. Sehingga, wajar setiap tahun jika semua daerah disibukkan dengan pembahasan raperda LKPJ itu. Maka, di triwulan pertama tahun berikutnya, para wakil rakyat melakukan kajian secara menyeluruh



atas laporan bupati yang disampaikan kepada anggota dewan. Mulai dari telaah akademik, hingga sinkronisasi data dengan fakta di lapangan.

Pembahasan LKPJ itu dimulai dengan nota penjelasan bupati atas raperda itu, yang dilanjutkan dengan pemandangan umum (PU) sejumlah fraksi dan direspon oleh bupati. Biasanya, itu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri eksekutif dan legislatif. Puncaknya, setelah dilakukan pembahasan secara umum, baru akan dibahas secara detil dan mendalam oleh panitia khusus (pansus). Di bahasan itulah nantinya semua fakta akan terungkap dengan terang termasuk dalam penggunaan anggarannya.

Di tangan pansus, pembahasan dilakukan se-



KALEIDOSKOP



cara intensif, bahkan bisa setiap hari. Tidak hanya siang, malam pun dilakukan bahasan. Itu dilakukan agar pembahasan bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Pembahasan itu cukup panjang, lantaran pembahasan yang dipimpin oleh Dul Siam itu memanggil semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dibutuhkan keterangannya untuk konfirmasi data yang dikantonginya.

Bahkan, pembahasan dengan satu instansi itu keangkala harus membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Itu lantaran alatnya pembahasan, termasuk tidak sinkronnya data dengan fakta di lapangan. Sehingga, bisa menyebabkan terjadinya deadlock, tidak ada titik temu antara dewan dengan eksekutif. Tidak hanya itu, dewan harus turun lapangan untuk memastikan kondisi riil di lapangan, untuk meng-





hindari terjadinya pekerjaan fiktif. Sebab, bahasan itu tentu berkaitan dengan validasi data dan lapangan.

Kendati demikian, keseriusan anggota dewan untuk membahas raperda itu membuahkan hasil yang baik. Mereka berhasil menuntaskan pembahasan tersebut dengan tepat waktu. Dinamika pembahasan yang terjadi hal yang biasa. Bahkan, untuk menghadirkan pembahasan berkualitas tersebut, para legislator juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder lainnya. Misalnya, dengan lembaga swasta, akademisi dan lainnya.

Tak hanya itu, konsultasi dengan lembaga vertikal seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian lain yang dibutuhkan juga dilakukan para anggota dewan. Hal itu dilakukan agar hasil bahasan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya alias on the track. Intinya, hasil dari pembahasan itu harus dipastikan berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang sudah ada.

Perjuangan untuk pembahasan itu akhirnya tuntas dan klir. Dan, langsung dibawa dalam sidang paripurna untuk disahkan. Dari bahasan itu, kemudian memunculkan berbagai rekomendasi dari pansus. Rekomendasi itu diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada eksekutif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berjalan. Sehingga, dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan memiliki azas manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan pansus dalam laporan akhir itu adalah berkaitan dengan gedung KIH (Kawasan Industri Hasil Tembakau). Di mana, sampai defik ini gedung yang dibangun dengan anggaran miliaran itu terkesan mubazir, sebab tidak difungsikan dan belum memberikan azas manfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga, bangunannya pun menjadi sia-sia sampai saat ini. Padahal, keberadaannya nanti bisa menjadi pusat industri hasil tembakau masyarakat kota Sumekar.

Oleh sebab itu, pansus merekomendasikan untuk segera dimanfaatkan agar memberikan azas manfaat. Padahal, pemerintah hanya tinggal "mengeksekusi" untuk difungsikan, apalagi gedungnya milik negara. Sejatinya, jika pemerintah tidak mau mengelola, maka bisa menggandeng pihak swasta atau mengajjar kerjasama untuk pengelolannya. Bahkan, jika diperlukan bisa melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dianggap kompeten menjadi pengelola.

Selain itu, pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Sumekar itu hendaknya terus digalakkan. Utamanya, usaha-usaha yang masih belum berkembang untuk menjadi perhatian pemerintah. Sebab, keberadaan usaha kecil ini semua terkendala dengan faktor dana yang tidak memadai. Sehingga, pemerintah harus memberikan stimulus anggaran layak agar terus berkembang.

Sebab, harus diakui keberadaan UMKM ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, yang notabennya bisa menunjang kesejahteraan mereka. Otomatis, ketika ekonomi ini bergerak maka akan



berdampak pada pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Jadi, pemberdayaan harus dilakukan oleh pemerintah. Termasuk perhatian juga harus ditujukan kepada UMKM yang sudah berprestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Permasalahan Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU) juga tidak lepas dari atensi pangsus. Di mana eksekutif dinilai lamban dalam perbaikan atau pemeliharaan PJU yang sudah mati atau rusak. Banyak lampu yang sudah rusak atau mati terkesan malah dibiarkan, tidak dilakukan perbaikan. Padahal, lampu jalan terbilang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena masuk kebutuhan dasar. Tidak hanya itu, matinya lampu juga bisa menyebabkan gelapnya penerangan jalan.

Selain itu, ketika keberadaan lampu yang tidak cepat dilakukan perbaikan maka bisa menyebabkan semakin meningkatkan kriminal di masyarakat. Sehingga, pemeliharaan lampu harus dilakukan secara cepat. Sehingga, diperlukan adanya pengawasan dan kontrol setiap saat atas keberadaan PJU tersebut. Sehingga, saat diketahui ada yang mati langsung dilakukan perbaikan. Yang tidak kalah penting juga, dalam pemasangan tiang jaraknya hendaknya diperpendek dan pemasangannya dilakukan secara menyeluruh hingga ke pelosok desa.

Dalam hal birokrasi, dewan menyarankan agar ASN (Aparatur Sipil Negara) hendaknya bekerja secara profesional, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebab, para abdi negara itu sudah paham akan tugasnya, hanya tinggal menjalankannya. Sebab, hasil amatnya ada beberapa abdi negara yang bekerja di luar tugasnya. Itu menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Sehingga, profesionalisme para pegawai pemerintah itu menjadi pertanyaan. Maka, hal itu diharapkan menjadi atensi dari bupati dan pimpinan OPD terkait.

1. Terkait profesionalisme ASN harus ditegakkan dalam hal terkait tupoksinya masing-masing. Faktanya banyak ASN yang mengurus sesuatu perkara di luar tupoksinya.

2. Pembahasan LKPJ oleh anggota DPRD ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di mana dalam Pasal 18 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Juga dalam penyampaian LKPJ Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2020 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021. •

A stack of several coins is placed on a silver calculator. The background features a date sheet with dates from 2011 to 2012 and a calculator keypad with numbers and symbols. The overall theme is financial and administrative.

KECEWA SERAPAN APBD RENDAH

Serapan Anggaran tahun 2023 lalu di Kabupaten Sumenep terbilang cukup rendah. Buktinya, masih banyak anggaran yang tidak terlaksana; dan menyebabkan terjadinya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Fenomena tersebut menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan di kota Sumekar, terkesan tidak serius dalam menjalankan kegiatan, program atau proyek yang sudah direncanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).





Seyogyangnya, keberadaan anggaran dengan kegiatan variatif hendaknya bisa dilaksanakan maksimal dengan penuh tanggungjawab. Yakni, masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus berjiwa dalam merealisasikan anggaran. Sebab, penganggaran di awal tahun atau tahun sebelumnya mengisyaratkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan masyarakat. Nyatanya, malah tidak terserap.

Tentu saja, masih banyaknya anggaran yang tidak terserap itu menjadi tanda tanya anggota dewan. Bahkan, para legislator menjadi geram dan kecewa dengan adanya sisa anggaran yang meminta untuk dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya. Hal itu menandakan jika keberadaan anggaran hanya dipersiapkan saja, bukan untuk dilaksanakan. Sehingga, sampai pada akhir tahun, anggaran yang sudah tersedia tersebut malah tidak diserap, atau kegiatannya tidak dilaksanakan.

Versi dewan, bisa saja penganggaran yang dilakukan dalam APBD itu hanya sebatas formalitas dan tidak menjadi kebutuhan mendesak. Otomatis,

hanya sebatas ketersediaan anggaran saja. Selain itu, belum adanya perencanaan yang matang dalam menyusun kegiatan. Sebab, banyak kegiatan yang malah sama atau copy paste dengan kegiatan sebel-



KALEIDOSKOP

umnya – mungkin – bukan didasarkan pada kebutuhan yang cukup mendesak dan bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Seharusnya, perencanaan kegiatan dilakukan secara integratif antara instansi yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep. Yakni, saling berbagi dan berhubungan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, tidak ada kesan OPD berjalan masing-masing. Maka, sudah pasti penganggarannya akan lebih baik. Pun, serapannya akan serentak dilakukan lantaran keberlanjutan satu kegiatan tersebut.

Pada dasarnya serapan maksimal itu tergantung pada kemauan (political will) dari masing-masing instansi. Dengan kata lain, keseriusan dan para pemangku kebijakan di masing-masing dinas maupun badan merupakan penentu tinggi rendahnya serapan anggaran. Sebab, anggaran yang sudah ada dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, hanya tinggal menjalankannya.

Maka, menjadi wajar, di setiap awal tahun para legislator selalu mendesak bupati dan pimpinan OPD untuk menjalankan kegiatan secara serius. Bahkan, pelaksanaannya pun harus direalisasikan sejak awal. Sehingga, memiliki rentang waktu yang panjang dalam pelaksanaannya. Apalagi, berkaitan dengan



proyek gedé yang masih membutuhkan proses panjang, seperti tender atau lelang. Faktanya, realisasinya anggaran tetap saja selalu molor, kalau tidak baru dilaksanakan pada pertengahan tahun.

Terlepas dari semua itu, serapan anggaran di tahun 2023 itu memang tidak maksimal dan menyisakan SILPA sebesar Rp 411.542.023.795. Dan, apabila disandingkan dengan Pembiayaan Netto yang mencapai besaran sebesar Rp 423.617.292.585. Maka terdapat defisit sebesar sebesar Rp 12.075.268.789.





Dari data itu silpa di tahun lalu terbilang cukup tinggi dan ini membuat geram para anggota dewan.

Sebab, keberadaan silpa yang tinggi itu terungkap dari Laporan Pertanggungjawaban bupati tahun 2023 yang dibahas oleh anggota dewan melalui panitia khusus (Pansus). Bahkan, saat pembahasan anggota dewan mengaku sangat terkejut dengan



besaran sisa anggaran dimaksud. Bahkan, secara detail mempertanyakan tingginya silpa tersebut, kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan dinas terkait.

Kemudian, dalam hasil pertemuan itu kemudian anggota dewan menarik kesimpulan jika tingginya

silpa akibat ketidakseriusan perencanaan pemerintah daerah. Sehingga, bisa dianggap sebagai kegagalan yang harus dibenahi untuk pembangunan yang lebih baik pada tahun berikutnya. Sehingga, di tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan serapan lebih baik, tentu untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura itu.

Rekomendasi Pansus

Pansus Laporan Pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 itu sudah bekerja baik dan penuh tanggungjawab. Sebab, mereka bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bamus (Badan Musyawarah) DPRD. Bahkan, kerjanya dilakukan secara maraton dan purna waktu. Kadangkala pembahasan dilakukan di luar kantor di hari libur, atau bahkan sampai malam hari. Hal itu dilakukan agar tidak menunggak pembahasan, dan bisa dituntaskan dengan cepat.

Dari pembahasan yang dilakukan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan pansus. Setidaknya, rekomendasi itu dikeluarkan karena dianggap penting untuk pembangunan di kabupaten Sumenep. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan eksekutif dalam menjalankan kegiatan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten dengan logo kuda terbang itu.

Salah satu rekomendasi dari pansus adalah memaksimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di mana wakil rakyat keberadaan PAD dari tahun ke ta-



hun tidak perkembangan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Sumber pendapatan daerah hanya menoton di satu item kegiatan, tidak membuka ruang baru sebagai ikhtiar meningkatkan pendapatan. Itu butuh kreasi dan inovasi dari semua OPD yang memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan.

Setidaknya, ada sektor baru yang dibuka untuk peningkatan PAD tersebut. Pemerintah tidak hanya fokus yang sudah ada, termasuk juga memaksimalkan sektor yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, di sektor pariwisata harus mampu ditingkatkan dari sebelumnya. Sebab, sejatinya dengan adanya event di Sumenep, yang diklaim mampu meningkatkan kunjungan wisata, maka pasti berpengaruh kepada pendapatan. Itu harus dimaksimalkan dan tidak boleh dan kebocoran.

Selain itu, OPD juga ditantang untuk membuka sektor baru yang bisa memberikan sumbangsih kepada pendapatan daerah. Sehingga, instansi itu diminta untuk berpikir keras agar bisa menghasilkan penerima yang baik. Para legislator tidak lagi menginginkan OPD hanya bekerja di belakang meja, menunggu yang sudah ada. Dengan demikian, akan tercipta Kemandirian Keuangan Daerah.

Rekomendasi lainnya adalah Perlunya perbaikan dari sisi perangkaan perencanaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas terhadap pengalokasian anggaran di masing-masing OPD dengan perhitungan yang tepat. Khususnya pada perhitungan Penganggaran belanja pegawai, untuk



kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan tambahan dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 1% (satu persen) untuk OPD yang jumlah belanjanya besar dan 2% (dua persen) untuk OPD yang jumlah belanjanya kecil.

Dua rekomendasi itu dianggap penting untuk



disampaikan kepada eksekutif dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Sehingga, pelan-pelan kabupaten Sumenep itu akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab, pergeseran ke arah yang lebih baik, adalah pertumbuhan, namun jika tetap dengan pola lama berarti stagnan.*



BERJIBAKU TUNTASKAN RPJPD



Anggota DPRD Sumenep disibukkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Di mana rancangan regulasi tersebut dianggap sangat penting untuk diselesaikan, atau sifatnya sangat mendesak. Sehingga, para legislator harus berjibaku dengan waktu untuk menuntaskan rancangan peraturan dimaksud.

KALEIDOSKOP

Alasannya, rancangan peraturan itu berkaitan dengan pembangunan Kabupaten ujung Timur Pulau Madura selama 20 tahun ke depan. Sehingga, harus dilakukan secara serius dan penuh tanggungjawab. Itu berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan di kota Sumekar, termasuk juga dengan nasib rakyatnya. Sebab, setiap pembangunan pasti akan diarahkan kepada kepentingan rakyatnya, yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Itu dalam substansinya.

Apalagi, keberadaan RPJPD itu juga akan dijadikan rujukan nantinya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, keberadaan RPJPD dituntut untuk berkualitas dan memiliki landasan filosofis pada pembangunan daerah yang lebih baik. Tidak boleh dilakukan dengan serampangan agar bisa memberikan efek yang baik dalam konteks pembangunan di Kabupaten dengan logo kuda terbang itu.

Maka, wajar jika pembahasan raperda tersebut dilakukan dalam waktu yang agak panjang, lebih dari 20 hari. Waktu tersebut tentu saja belum terbit-

ang sangat panjang, karena dokumen yang akan dibahas cukup banyak menyangkut masa depan kota Sumekar. Wajar, apabila pembahasan dilakukan secara maraton oleh tim kecil yang disebut dengan panitia khusus (pansus). Pembahasan dilakukan secara ekstra dan penuh waktu.

Pembahasan itu dimulai dengan nota penjelasan bupati atas raperda tersebut, yang kemudian dijawab oleh sejumlah fraksi yang ada di gedung dewan. Itu dilakukan untuk mempertajam dan mengevaluasi paparan yang disampaikan oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu. Setelah tahapan "formalitas" itu dilakukan, baru dilakukan pembahasan secara mendalam dan menyeluruh di pansus.

Dalam pembahasannya, pansus melibatkan banyak pihak dari eksekutif. Salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR). Pembahasan dengan kedua instansi itu sangat intensi dilakukan untuk mematangkan draf dokumen yang sudah ada. Sebab, dua instansi tersebut yang terlibat merencanakan dan membangun kota Sumekar itu.





Selain itu, pansus juga melibatkan tim ahli untuk menghasilkan produk raperda yang berkualitas dengan kajian objekif akademis. Pada raperda itu, tim ahli dari Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Kedua perguruan tinggi dianggap kapabel untuk memberikan saran, ide dan gagasan akademik berkaitan dengan dokumen yang sedang dikaji oleh pansus, yakni raperda RPJPD. Harapannya, produk yang dihasilkan bisa memberikan azas manfaat untuk pembangunan Sumenep.

Tidak hanya itu, untuk produk berkualitas, juga melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan atas raperda tersebut. Sebab, masyarakat yang merupakan objek kegiatan dinilai mampu memberikan kajian di lapangan, terkait keinginan dan kebutuhan mereka dalam jangka 20 tahun ke depan. Meskipun, nantinya masih akan diperpeda dengan program lima tahunan lewat RPJMD itu.

Konsultasi juga dilakukan oleh para legislator tersebut. Biasanya konsultasi dilakukan kepada pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Timur, dan pemer-

inta pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian lainnya yang dianggap berhubungan dengan dokumen yang sedang dibahas wakil rakyat. Sebab, para anggota dewan ingin menghasilkan produk berkualitas dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Terlepas dari semua itu, pansus sudah bekerja maksimal untuk mampu menuntaskan raperda RPJPD tersebut. Sehingga, rancangan regulasi tersebut bisa dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Badan Musyawarah. Itu perlu diberikan apresiasi kepada pansus yang sudah bekerja keras tanpa mengenal waktu. Bayangkan, hari libur Sabtu dan Minggu para legislator itu masih saja menyempatkan melakukan pembahasan. Itu karena mereka akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, apalagi jabatannya sudah hampir berakhir dalam hitungan bulan.

Hasil Pembahasan

Setelah fokus melakukan pembahasan secara maraton, akhirnya tuntas juga. Pembahasan yang dilakukan tersebut berdasarkan kepada Pasal 5 Un



dang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJP Daerah sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Oleh karenanya, maka Sumenep dalam jangka 20 tahun ke depan memiliki visi yaitu Sumenep bermartabat, maju dan berkelanjutan. Visi tentu saja berkelindan dengan visi nasional dan provinsi Jatim. Di mana visi Nasional adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, dan untuk visi Provinsi Jawa Timur adalah Jawa Timur Berakhlak, maju Berdaya Saing Global Sejahtera dan Berkelanjutan. Tentunya visi sudah bisa dikatakan memiliki keterkaitan secara nasional

Dari visi tersebut maka dituangkan dalam lima sasaran visi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) produktif, dan berdaya saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerataan Pembangunan yang diukur melalui indika-

tor pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Gini, dan Indeks Infrastruktur. Kemudian, Tata Kelola Berkualitas dengan indikator Indeks reformasi Birokrasi. Selanjutnya, penurunan emisi gas rumah kaca menuju zero net emission dengan indika-



tor emisi GCR. Terakhir adalah Daya Tarik ekonomi Madura dengan indikator Icor.

Dalam mendukung pelaksanaan visi itu, maka dirumuskan sebuah misi dengan agenda pembangunan yang terarah dan tepat. Itu bisa dilihat dalam misi mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing global dan sejahtera, meningkatkan daya saing ekonomi sektor unggulan berbasis inovasi riset dan teknologi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adatif, penguatan stabilitas ketenagaaan dan ketertiban umum dan fiskal daerah

Selanjutnya, misi yang akan dijalankan oleh pemerintah Sumenep yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan mempertimbangkan lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang akan menjadi agenda dari pemerintah untuk dieksekusi menjadi sebuah kebijakan nantinya.

Rumusan itu tentu saja sudah disesuaikan dengan



kondisi geografis dan sosial masyarakat kota Sumekar itu. Dengan begitu bisa memberikan dampak yang baik dalam proses pembangunan fisik maupun kualitas manusianya. Legislatif hanya mampu mendorong segala bentuk kebijakan yang mampu menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sehingga, eksekusi harus mampu memastikan segala agenda pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Sebab, secara garis besar pemerintah nantinya masih akan mengurai visi misi secara makro tersebut dalam bentuk kebijakan dalam RPJMD lima tahunan. Di mana nantinya akan disusun dalam 19 sasaran pokok, dan 60 indikator sasaran pokok yang terbagi dalam 4 periode lima tahunan. Yang jelas, hasil yang dibahas kali ini akan menjadi acuan pemerintah dalam pembangunan.

Sebenarnya, hasil pembahasan yang dilakukan pansus itu sudah dilaporkan dalam sidang paripurna yang digelar oleh DPRD. Laporan itu disampaikan secara tertulis. Tentu saja, hasil yang diperoleh dari pembahasan itu tidak hanya terfokus kepada visi dan misi saja, melainkan banyak item. Itu sudah disampaikan secara komprehensif dalam sidang akhir laporan pansus. •

DORONG PEMBANGUNAN PRO RAKYAT

Zainal Arifin, Politisi PDI Perjuangan resmi dilantik sebagai ketua DPRD Sumenep definitif periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan di gedung dewan yang baru di jalan Raya Sumenep - Pamekasan, oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat, Rabu (9/10/2024). Suasana pelantikan berlangsung lancar, khushuk dan penuh khidmat. Semua undangan yang menghadiri kegiatan tersebut menyaksikan dengan penuh seksama.





Tidak hanya pelantikan ketua, wakil ketua definitif juga dikukuhkan pada kesempatan tersebut. Masing-masing, Dul Siam dari fraksi PKB, Indra Wahyudi dari Fraksi Partai Demokrat dan M. Syukri dari PPP. Dengan begitu, maka pimpinan dewan dinyatakan sudah lengkap. Maka, dipastikan tugas kedewanan akan berjalan maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sudah menjadi kewenangannya.

Hadir dalam pelantikan tersebut Plt Bupati Sumenep Dewi Khalifah, Sekdakab Edy Rasyadi, Ketua PN Sumenep, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah anggota dewan. Sejumlah camat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), wartawan dan sejumlah elemen terkait lainnya juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ruangan paripurna itu terlihat cukup ramai. Sebelum pelantikan, dibacakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang pengangkatan pimpinan DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris Yanuar Yudha Bachfiar.

Dalam sambutannya, ketua DPRD Sumenep

Zainal Arifin mengaku bahagia dan bersyukur dengan pelantikan dirinya. Kendati demikian, ada pesan amanah yang harus dijaga, tidak hanya kepada manusia melainkan kepada sang pencipta. Sehingga,



dinnya bersama tiga pimpinan tentu saja dituntut untuk melaksanakan tugas secara benar sesuai konstitusi yang ada. Sebab, yang diembannya adalah tanggungjawab yang harus dijaga dengan baik.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan, membangun sinergi, kebersamaan dan kekompakan di internal DPRD dan eksekutif untuk sama-sama menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tertib untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten ujung Timur Pulau Madura. Sehingga, perekonomian menjadi bergerak dan pendapatan masyarakat akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.

Sebab, Kota Sumekar memiliki potensi SDA yang cukup melimpah. Dengan harapan bisa digarap dengan baik yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Salah satunya, ada di sektor pertanian, Perikanan, Pariwisata dan potensi lainnya. Hanya saja, dibutuhkan kemauan yang tinggi untuk mengelolanya. Oleh karenanya DPRD hanya mampu mendorong dan menekan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh kabupaten Sumenep itu.

Oleh sebab itu, pengelolaan potensi SDA yang benar akan mendorong terciptanya peningkatan



ekonomi masyarakat. Ini adalah tanggungjawab yang harus dilakukan oleh DPRD dan eksekutif. Sehingga, mobilitas ekonomi masyarakat menjadi bergerak dengan baik, tidak stagnan. Gilirannya, bisa mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten dengan logo kuda terbang itu.

Selain itu, Zainal Arifin juga menegaskan, pihak



nya akan membangun kolaborasi yang baik dengan eksekutif dalam mendorong peningkatan pelayanan dengan terciptanya slogan "Bismillah Melayani" itu. Sebab, pelayanan adalah hal dasar yang dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, dibutuhkan pelayanan prima, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya



berkaitan dengan maksimisasi pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Yakni, terwujudnya visi dan misi kepala daerah, dengan muaranya pada kesejahteraan masyarakat.

Zainal menegaskan, DPRD adalah lembaga rakyat, sehingga aspirasi atas kebutuhan dan

keinginan masyarakat menjadi hal penting dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sebab, rakyat adalah subjek dan objek dari kegiatan yang dianggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sehingga, kebutuhan masyarakat harus diutamakan, melebihi dari kepentingan pihaknya.

"Makanya, kami akan menjadikan kantor dewan itu sebagai simbol perjuangan rakyat untuk mencapai cita-citanya. Apalagi, dalam negara demokrasi yang notabennya adalah menyalurkan kepentingan masyarakat. Jadi, akan kami perjuangkan segala aspirasi dan masyarakat Sumenep," kata Zainal Arifin.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Zainal menegaskan jika pihaknya akan memperkuat tiga fungsi DPRD, yakni Legislasi (Perundangan), Budgetting (Penganggaran) dan Controlling (Pengawasan). Juga, yang terpenting adalah menciptakan mitra sejajar dengan eksekutif dengan menyamakan persepsi dan pandangan. Membangun hubungan yang dialogis, tanpa melihat perbedaan.

Oleh karenanya, pihaknya akan mendorong segala kebijakan dan program yang pro rakyat, namun juga akan selalu mengingatkan atau mengkritik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, DPRD juga akan mengambil bagian jika ada masalah, dengan memberikan solusi berkaitan dengan persoalan pembangunan. Sehingga, pelibatan banyak pihak, mulai dari aktifis, tokoh masyarakat,



tokoh agama dan sejumlah elemen lainnya dalam ikut mengkaji segala permasalahan yang ada.

Intinya, menurut Zainal, pihaknya menginginkan pembangunan yang baik dan inovatif, tidak stagnan. Bahkan, pihaknya berkomitmen untuk memangkas atau mengubah aturan yang sekitarnya bisa menghambat inovasi daerah. Sebab, itu adalah prosedur yang kaku dan sangat menyulitkan kepada masyarakat. Namun, tetap harus regulatif agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu, sebagai Ketua DPRD pihaknya mengajak kepada semua elemen masyarakat, utamanya di internal dewan untuk bahu membahu, dan membangun kekompakan untuk ikut ambil bagian berkontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Sumenep. Sebab, pembangunan itu harus dibangun dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. "Ayo bersama membangun Sumenep untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

PLT BUPATI SAMPAIKAN SELAMAT

Plt Bupati Sumenep Dewi Khalifah menyampaikan selamat dan sukses kepada pimpinan DPRD yang baru saja diambil sumpahnya. Dan, bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan yang berlaku. "Atas nama pemerintah kabupaten kami sampaikan selamat dan sukses, semoga bisa men-



jalankan amanah dengan baik sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangannya," katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya menginginkan adanya kordinasi dan sinergi dengan baik antara DPRD dengan pemerintah daerah. Utamanya, berkaitan dengan peraturan daerah yang aspiratif dan



responsif untuk mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat. "Kerjasama yang dibangun disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Intinya, bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan muara pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.*



KALEIDOSKOP 2024

Oleh:

Yanuar Yudha Bachtiar
Sekretaris DPRD Sumenep

Bangga rasanya melihat dedikasi dan semangat kerja yang ditunjukkan oleh para anggota dewan yang baru dilantik beberapa bulan lalu. Dalam waktu singkat, mereka telah memperlihatkan komitmen yang nyata dan produktivitas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Peralihan dari anggota DPRD lama ke yang baru ini bukanlah proses yang mudah. Selama tahun 2024, banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk penyesuaian dengan kebijakan baru dan penyelesaian berbagai program yang telah dimulai oleh anggota sebelumnya. Namun, dengan semangat kerja yang tinggi dan kolaborasi yang baik, para anggota DPRD yang baru berhasil melanjutkan dan menyelesaikan berbagai program tersebut dengan baik.

Sejak hari pertama, para anggota DPRD ini langsung terjun ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bekerja keras untuk mewujudkan berbagai program yang telah direncanakan. Mereka tidak mau berleha-leha atau menunda-nunda pekerjaan, melainkan langsung mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep.

Kehadiran mereka di berbagai kegiatan masyarakat, rapat-rapat penting, dan diskusi-diskusi strategis menunjukkan bahwa mereka memahami betul pentingnya peran mereka sebagai wakil rakyat.

Mereka tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga turun langsung untuk melihat dan merasakan sendiri kondisi di lapangan. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif, karena masyarakat merasa lebih dekat dan lebih didengar oleh para wakil mereka.

Dengan semangat kerja yang tinggi dan komitmen yang kuat, saya yakin bahwa para anggota DPRD Kabupaten Sumenep ini akan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah kita tercinta. Semoga semangat ini terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bekerja keras demi kemajuan bersama.

Menjelang tahun 2025, para anggota DPRD Kabu-

paten Sumenep siap menyongsong berbagai tantangan dan peluang yang ada. Mereka bertekad untuk terus bekerja tanpa henti, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat, kita semua berharap bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan pencapaian dan kemajuan bagi Kabupaten Sumenep. Mari kita dukung bersama-sama para anggota DPRD kita dalam melaksanakan tupoksinya demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah pembentukan fraksi-fraksi di DPRD. Fraksi-fraksi ini berfungsi sebagai wadah bagi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan politik mereka, serta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya fraksi-fraksi, diharapkan proses legislasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, alat kelengkapan dewan juga telah dibentuk, mulai dari komisi-komisi hingga Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D). Komisi-komisi ini bertugas untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

Sementara itu, Badan Kehormatan bertugas untuk menjaga integritas dan etika para anggota dewan, serta memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan ini, diharapkan kinerja DPRD Kabupaten Sumenep dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Para anggota dewan kini memiliki struktur yang jelas dan terorganisir untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.

Semoga semangat kerja keras dan dedikasi ini terus berlanjut, membawa Kabupaten Sumenep menuju masa depan yang lebih baik. *



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMENEP
MENGUCAPKAN

Selamat
**TAHUN
BARU
2025**

Selamat tinggal 2024, selamat datang 2025!
Semoga tahun baru ini membawa kedamaian,
kesuksesan, dan kebahagiaan untuk kita semua.



PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMENEP
MENGUCAPKAN

Selamat Hari Ibu

22 Desember 2025

*Semoga Ibu selalu diberikan
kebahagiaan tanpa henti*

